

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Good Corporate Governance

2.1.1.1 Definisi Good Corporate Governance

Istilah *corporate governance* telah banyak didefinisikan tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain bergantung kecenderungan pihak yang mendefinisikannya.

Dalam buku Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam praktik bisnis Hamdani (2016:20) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*.

Definisi ini menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi. Sedangkan the Organization of Economic Corporation and Development

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Hal ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum :

1. Transparansi

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi (*tranparency*) mengandung unsur pengungkapan (*discloure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat

waktu. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

2. Akuntabilitas

Prinsip dasar akuntabilitas (*accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:

- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan,

serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- e. Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

3. Independensi

Prinsip dasar independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik
Bisnis)

4. Kewajaran

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis yaitu:

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender* dan kondisi fisik.(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

5. Responsibilitas

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

Prinsip dasar responsibilitas (*responsibility*), pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis diantaranya:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial di antaranya: kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

2.1.1.3 Tujuan dan manfaat Good Corporate Governance

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Usaha Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.
2. Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara *professional, transparant*, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
3. Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholder* (melindungi hak *stakeholder*).
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

2.1.1.4 Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Berikut ini disajikan beberapa teori yang relevan terkait dengan praktik GCG di Indonesia (Hamdani, 2016:29). Teori *corporate governance* dapat diformulasikan dalam model-model *corporate governance* yang bersifat *mainstream* seperti masing-masing teori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Finance Model (*Agency Theory*)

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*Agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*confilct interest*). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham.

Biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi: *monitoriung cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya

yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak akan kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. (Hamdani, 2016:30 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis).

2. Stewardship Model (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori *stewardship* beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, peneliti telah mempertentangkan teori *agency* dan *stewardship*, namun gagal menguji aspek psikologis dan situasional yang dapat menjadi pondasi teori *stewardship*. Donaldson & Davis (1991) beranggapan bahwa teori *stewardship* adalah benar dan teori *agency* salah.

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada tujuan untuk kepentingan organisasi. Beberapa modal yang dipilih oleh *agent* dan *pricipal* dalam pengambilan keputusan ada empat macam (Hamdani, 2016:34 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis):

- a. Meminimalisir biaya potensial
 - b. Agen bertindak oportunistik
 - c. Prinsipal bertindak oportunistik
 - d. Memaksimalkan kinerja potensial
3. Stakeholders Model (*Stakeholders Theory*)

Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963. *Stakeholder* didefinisikan sebagai “*any group or individual who can effect or be affected by the achievement of an organization’s objective*”. Bahwa *Stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam pelaksanaan GCG, terdapat perbedaan pelaksanaannya di tiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antar lain seperti kerangka hukum, maupun hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki

pengaruh luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik.

Penerapan GCG pada masing-masing Negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Berkaitan dengan sistem ekonomi, GCG tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus dilakukan bersama. Perkembangan pasar modal dan sektor keuangan, terutama sektor perbankan sangat memengaruhi efektifitas GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar: negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai penggunaan produk dan jasa dunia usaha. (Hamdani, 2106, 25) Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenanya Negara mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip *good governance* (GG) akan memiliki kredibilitas yang rendah korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerpakan GCG sebagai pedoman dasar melakukan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh

organ-organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam rangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabeneanya dikuasai oleh publik, atas dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab.

2.1.1.6 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undang (Hamdani, 2016, 80). Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan direksi.

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan oleh Dewan Komisaris pada mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepada RUPS.
- b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG.
- c. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.
- e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik. Dalam hal direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, di antaranya:

- a. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS.
- c. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara acara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan.
- d. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung.

- e. Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut.

2.1.1.7 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.1.1.8 Dewan Direksi

Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasi kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan dengan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a. Komposisi Direksi harus seimbang rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

- d. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.9 Komite Audit

Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Bagi perusahaan yang seharusnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Struktur pengendalian internal dilaksanakan dengan baik
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

2.1.2 Struktur Modal

2.1.2.1 Definisi Struktur Modal

Struktur Modal adalah pembelanjaan yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal tercermin dalam hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri., kedua golongan tersebut merupakan dana jangka panjang. Dengan demikian struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari stuktur keuangan. Struktur keuangan mencerminkan perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri (Riyanto, 1999). Struktur modal merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan.

Capital Structure (struktur modal) didefinisikan sebagai komposisi modal perusahaan dilihat dari sumbernya khususnya yang menunjukkan porsi dari modal perusahaan yang berasal dari sumber utang (kreditur) dan sekaligus porsi modal yang berasal dari pemilik sendiri (*owners' equity*). Struktur modal diukur menggunakan tiga indikator, yaitu *Leverage*, *debt to equity* dan *collateralizable assets*. *Leverage* mencerminkan penggunaan sumber dana yang berasal dari utang jangka panjang (modal asing) yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan., seperti beban bunga. Nilai dari indikator ini ditentukan menggunakan *long term debt to total assets ratio* (Sugeng, 2009:41).

Terdapat dua sumber pendanaan perusahaan [Rodoni dan Ali (2010)], yaitu :

1. Pendanaan internal berasal dari *retained earning* sebagai sumber pendanaan perusahaan
2. Pendanaan eksternal berasal dari luar perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Pengambilan investor ekuitas tidak dijamin karena tergantung laba di masa depan, sebaliknya pembayaran kreditor mensyaratkan pembayaran kembali di masa depan dengan bunga tertentu. Pendanaan dengan sumber eksternal umumnya lebih mahal dikarenakan adanya *transaction cost*.

2.1.2.2 Komponen Struktur Modal

Komponen struktur modal terbagi menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal.

2.1.2.2.1 Pendanaan Internal (Laba Ditahan)

Laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan sendiri oleh sebuah perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Akun ini berlebihan dengan modal saham dan tambahan modal yang berasal dari setoran modal pemegang saham.

Laba ditahan merupakan cara melakukan estimasi biaya laba ditahan adalah dengan cara mendiskontokan aliran kas atau pendekatan penilaian deviden yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang

saham. Secara teoritis, biaya laba ditahan akan lebih rendah dari pada biaya modal yang berasal dari hutang maupun dari saham baru. Hal ini disebabkan karena dalam penjualan saham baru biasanya terdapat biaya emisi atau *flotation cost* yang harus ditanggung perusahaan (Febriyanti, 2008, 39). Oleh karena itu perusahaan akan menerima kas yang lebih kecil.

2.1.2.2.2 Pendanaan Eksternal

a. Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo melebihi satu tahun, di neraca ditampilkan sebagai hutang tidak lancar. Terdapat beberapa jenis hutang jangka panjang antara lain (Husnan, 2004, 382)

b. Saham Istimewa (preferred Stock)

Sebagai sumber modal jangka panjang perusahaan saham preferen menduduki posisi antara hutang jangka panjang dan saham biasa (Brigham dan Gapenski, 2000, 826). Dalam proses likuidasi, pemegang saham preferen juga didahulukan dalam pembayaran hak-haknya sebelum pemenuhan kewajiban kepada pemegang saham biasa (Sartono, 2001, 41).

c. Saham Biasa (Common Stock)

Saham biasa merupakan saham permanen. Hal ini dikarenakan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan masih menjalankan kegiatan operasional. Saham

biasa disebut juga sebagai sekuritas dengan penghasilan yang tidak tetap yang disesuaikan dengan kondisi perolehan laba perusahaan.

2.1.2.2 Pengukuran Struktur Modal

Menurut (Kasmir, 2010:158) Struktur modal dapat dihitung dengan

- a. *Total Debt Assets Ratio*
- b. *Debt to Equity ratio*

Adapun penjelasan dari perhitungan rasio diatas adalah sebagai berikut:

2.1.2.2.1 *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang (*debt ratio*), mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya jadi semakin baik. Untuk mengukur besarnya *debt ratio* biasanya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aktiva}$$

2.1.2.2.2 *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal

sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal sendiri agar beban agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya *debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja keuangan menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo Gito sudarmo dan Basri (2002:275)

adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.1.3.2 Manfaat Penilaian Kinerja keuangan

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.3.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan efisiensi secara operasional maupun efisiensi penggunaan harta yang dimilikinya (Chen, 2004). Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya, juga merupakan elemen dalam menciptakan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan pada masa yang akan datang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas dapat ditentukan dari beberapa pengukuran seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Ang (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran profitabilitas yang digunakan adalah rasio pengambilan atas ekuitas karena rasio ini sangat berhubungan dengan struktur modal yang digunakan perusahaan, baik dipengaruhi oleh proporsi hutang jangka panjang atau modal sendiri. Lukman (1998) menyatakan bahwa pengembalian atas ekuitas merupakan suatu pengukuran dari *income* yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan.

2.1.4 Nilai Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai tunjangan lain. kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya lain. perusahaan ada karena untuk menghemat biaya transaksi semacam itu. Dengan menginternalisasi berbagai transaksi (yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan), perusahaan juga menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan (Kusumajaya. 2011: 30).

Nilai dari perusahaan bergantung tidak hanya pada kemampuan menghasilkan arus kas, tetapi juga bergantung pada karakteristik operasional dan keuangan dari perusahaan yang diambil alih. Beberapa variabel kuantitatif yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan menurut Keown dan Jhon (2011: 240) adalah sebagai berikut:

1. Nilai Buku

Nilai Buku (*book value*) merupakan nilai dari aktiva yang ditunjukkan pada laporan neraca perusahaan. Nilai ini menggambarkan biaya historis asset dari pada nilai sekarang. Sebagai contoh, nilai buku saham preferen suatu perusahaan adalah jumlah yang dibayarkan oleh investor yang awalnya untuk membayar saham tersebut dan jumlah yang diterima oleh perusahaan ketika saham diterbitkan.

2. Nilai Likuiditas

Nilai Likuiditas adalah sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aset dijual secara individual dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan. Contohnya, jika operasional perusahaan dihentikan dan asetnya dibagi serta dijual, maka harga jual tersebut merupakan nilai likuiditas aset.

3. Nilai harga Pasar

Nilai harga pasar dari suatu aset adalah nilai yang teramati untuk aktiva yang ada di pasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang bekerja sama di pasaran, dimana pembeli dan penjual menegosiasikan harga yang diterima untuk aktiva tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Sumber	Judul	Hasil penelitian
1	Cahyani Nuswandari (2009).	Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2009, Hal. 70 - 84 Vol. 16, No.2 ISSN: 1412-3126	PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> • variabel CGPI secara positif signifikan mempengaruhi kinerja operasi (ROE) • Hasil analisis regresi model Tobin's Q menunjukkan variabel CGPI secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar (Tobin's Q)
2	Sri Ayu Mahatma Dewi dan Wirajaya Ary (2013).	ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 358-372	PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA NILAI PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan, • Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan. • Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.
3	Mandalika, Andri (2016).	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016	PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, STRUKTUR MODAL, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan struktur aktiva, struktur modal, dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

			<p>PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI PADA SEKTOR OTOMOTIF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, struktur aktiva tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. • Secara parsial, struktur modal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. • Secara parsial, pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4	<p>Alfredo Mahendra Dj, Luh Gede Sri Artini, A.A Gede Suarjaya</p>	<p>Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan Vol. 6, No. 2 Agustus 2012131</p>	<p>PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. • Leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh leverage

				<p>terhadap nilai perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
5	Ni Ketut Karlina Prastuti dan Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2015).	ISSN: 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 114-129	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA NILAI PERUSAHAAN DENGAN MODERASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menemukan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. • kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan. • pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi pengaruh good corporate governance pada nilai perusahaan.
6	Tia Rizna Pratiwi, S.E., M.S.Ak. (2017).	JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 8, No. 1, Maret 2017 Halaman 85 – 97	PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Value added yang dihasilkan dari capital employed secara signifikan terbukti berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE perbankan di Indonesia • human capital secara signifikan terbukti berpengaruh positif terhadap ROA perbankan di Indonesia.

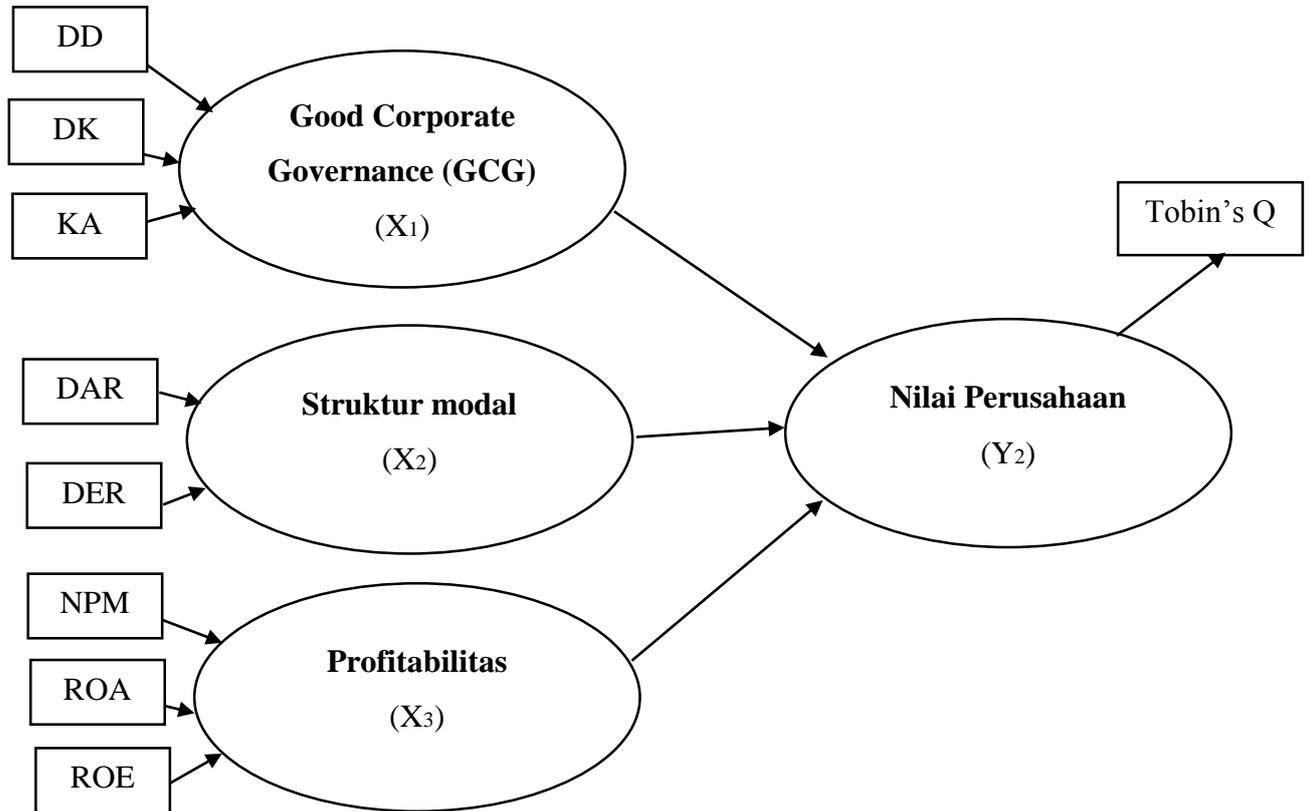
7	Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah M.Si., Ak. (2012).	Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2010)	<ul style="list-style-type: none"> • GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. • Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. • GCG dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
8	Nita Ayu Widyasari, Suhadak, Achmad Husaini (2015).	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 26 No. 1 September 2015	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kualitas auditor eksternal berpengaruh

			Terdaftar Di Bei Periode 2011-2013)	<p>negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. • Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
9	Rina Br. Bukit. (2012)	Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 4, No. 3, November 2012	PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI PROFITABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas memainkan peranan mediasi penuh dalam menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. • Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal yang baik dapat meningkatkan profitabilitas yang artinya semakin besar hutang maka rasio pengembalian atas ekuitas juga semakin besar. • Hasil penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi yang rendah sehingga pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh yang lemah dan diperkirakan ada variabel independen lain yang mempengaruhi nilai perusahaan.

10	Mafizatin Nurhayati. (2013)	Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, Juli 2013.	<p>PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DAN NILAI PERUSAHAAN SEKTOR NON JASA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kebijakan deviden. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. • Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan deviden. Profitabilitas perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. • Likuiditas perusahaan (<i>Current ratio</i>) memiliki koefisien negatif dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan deviden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
----	-----------------------------	---	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas. Maka hipotesis yang diuji adalah:

1. H1 = Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.
2. H2 = Struktur Modal Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.
3. H3 = Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.